

MODEL MANPOWER PLANNING SEBAGAI BASIS PERENCANAAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN SMK UNTUK MENINGKATKAN KETERSERAPAN TENAGA KERJA

Amal Purnomo¹, Hikmah Maulidah², Sudari³, Tri Ani Setiorini⁴

amalpurnomo22@gmail.com¹, bumaulida82@gmail.com², sudarid475@gmail.com³,

triani.setiorini@gmail.com⁴

Universitas PGRI Semarang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan model Manpower Planning dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) guna meningkatkan keterserapan tenaga kerja lulusan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus di beberapa SMK di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembiayaan yang berlandaskan Manpower Planning mampu menciptakan keselarasan antara kompetensi lulusan dan kebutuhan dunia kerja. Faktor-faktor seperti keterlibatan industri, alokasi dana yang tepat sasaran, dan penguatan kurikulum berbasis kompetensi menjadi kunci keberhasilan model ini.

Kata Kunci: Manpower Planning, Pembiayaan Pendidikan, SMK, Keterserapan Tenaga Kerja.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Manpower Planning model in education financing planning at Vocational High Schools (SMK) to improve the employability of graduates. This research employs a qualitative descriptive approach with a case study method conducted in several SMKs across three regencies, namely Semarang Regency and Blora Regency. The results show that financing planning based on Manpower Planning can create alignment between graduates' competencies and labor market needs. Factors such as industry involvement, targeted funding allocation, and strengthening competency-based curricula are key to the success of this model."

Keywords: Manpower Planning, Education Financing, Vocational High School, Employability.

PENDAHULUAN

Perencanaan tenaga kerja atau manpower planning merupakan aspek krusial dalam pengembangan sumber daya manusia, terutama di sektor pendidikan. Dalam konteks Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), perencanaan ini sangat penting untuk memastikan bahwa lulusan memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran di kalangan lulusan SMK masih cukup tinggi, mencapai 11,43% pada tahun 2022 (BPS, 2022). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki lulusan SMK dan kebutuhan pasar kerja.

Model perencanaan tenaga kerja yang efektif dapat memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum dan program pendidikan yang lebih sesuai dengan kebutuhan industri. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Purwanto dan Sari (2021), ditemukan bahwa 70% perusahaan mengeluhkan kurangnya keterampilan teknis di antara lulusan SMK. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan model yang dapat mengidentifikasi kebutuhan keterampilan dan merencanakan pendidikan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Dalam jurnal ini, kami akan membahas bagaimana model perencanaan tenaga kerja dapat digunakan sebagai basis dalam perencanaan pembiayaan pendidikan di SMK. Dengan menggunakan pendekatan berbasis data, kami akan mengidentifikasi faktor-faktor yang

mempengaruhi keterserapan tenaga kerja lulusan SMK dan bagaimana perencanaan yang baik dapat mengurangi angka pengangguran.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed methods), yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 100 lulusan di 3 SMK di Jawa Tengah, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 3 kepala sekolah SMK dan 6 perwakilan industri. Survei ini dirancang untuk mengumpulkan informasi mengenai tingkat keterserapan lulusan SMK di pasar kerja, keterampilan yang dibutuhkan, serta persepsi industri terhadap lulusan SMK.

Analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferensial untuk mengetahui hubungan antara model manpower planning dan keterserapan tenaga kerja. Sedangkan analisis kualitatif dilakukan dengan metode analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan tantangan dan peluang dalam penerapan model perencanaan tenaga kerja di SMK.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas model manpower planning dalam meningkatkan keterserapan tenaga kerja lulusan SMK. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih responsif terhadap kebutuhan industri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Manpower Planning

Manpower planning adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah dan jenis tenaga kerja yang tepat pada waktu yang tepat. Dalam konteks pendidikan, khususnya SMK, perencanaan ini melibatkan analisis kebutuhan industri, pengembangan kurikulum, serta penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung proses belajar mengajar. Menurut Mathis dan Jackson (2017), perencanaan tenaga kerja yang efektif harus mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi ketersediaan dan kebutuhan tenaga kerja.

Salah satu pendekatan dalam manpower planning adalah analisis kebutuhan tenaga kerja berdasarkan proyeksi pertumbuhan industri. Misalnya, sektor teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diperkirakan akan terus berkembang, sehingga memerlukan tenaga kerja yang terampil di bidang tersebut. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa penggunaan internet di Indonesia meningkat pesat, yang berimbas pada kebutuhan akan lulusan SMK dengan keterampilan di bidang TIK (APJII, 2022). Dengan demikian, SMK perlu menyesuaikan kurikulumnya agar lulusan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

Selain itu, penting untuk melibatkan pemangku kepentingan, seperti industri, pemerintah, dan masyarakat, dalam proses perencanaan tenaga kerja. Kolaborasi antara SMK dan dunia usaha dapat menciptakan program magang yang bermanfaat bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman langsung di lapangan. Penelitian oleh Nurlaila dan Rahman (2020) menunjukkan bahwa siswa yang mengikuti program magang memiliki peluang lebih tinggi untuk diterima bekerja setelah lulus dibandingkan dengan mereka yang tidak mengikuti program tersebut.

2. Pembiayaan Pendidikan SMK

Pembiayaan pendidikan di SMK merupakan faktor kunci yang mempengaruhi kualitas pendidikan dan keterserapan lulusan di pasar kerja. Dalam konteks ini, model

perencanaan tenaga kerja dapat berfungsi sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya keuangan secara efektif. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), alokasi dana untuk pendidikan vokasi masih kurang dibandingkan dengan pendidikan umum, yang berdampak pada kualitas pendidikan di SMK (Kemendikbud, 2021).

Salah satu strategi dalam pembiayaan pendidikan SMK adalah dengan memanfaatkan dana dari pemerintah, swasta, dan masyarakat. Misalnya, program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan pendidikan vokasi. Dalam laporan yang diterbitkan oleh World Bank (2020), disebutkan bahwa investasi dalam pendidikan vokasi dapat memberikan imbal hasil yang tinggi, baik bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi SMK untuk menjalin kemitraan dengan industri guna mendapatkan dukungan finansial yang diperlukan.

Selain itu, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan di SMK. Dengan adanya sistem pengelolaan yang baik, diharapkan dana yang tersedia dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penelitian oleh Setiawan dan Prasetyo (2022) menunjukkan bahwa SMK yang memiliki sistem pengelolaan keuangan yang transparan cenderung memiliki keterserapan lulusan yang lebih tinggi di pasar kerja.

3. Implementasi Model Manpower Planning di SMK

Implementasi model manpower planning di SMK memerlukan langkah-langkah strategis yang terencana. Pertama, SMK perlu melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja secara berkala dengan melibatkan industri terkait. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja dan menyesuaikan kurikulum yang ada. Dalam penelitian oleh Hidayat dan Yuniarti (2021), ditemukan bahwa SMK yang rutin melakukan analisis kebutuhan tenaga kerja mampu meningkatkan relevansi kurikulum dan keterserapan lulusan.

Kedua, pengembangan program pelatihan dan magang yang terintegrasi dengan industri sangat penting. SMK harus menjalin kemitraan dengan perusahaan untuk menyediakan program magang yang berkualitas bagi siswa. Program magang tidak hanya memberikan pengalaman praktis, tetapi juga membangun jaringan yang dapat membantu siswa dalam mencari pekerjaan setelah lulus. Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan, siswa yang mengikuti program magang memiliki peluang 30% lebih tinggi untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan mereka yang tidak mengikuti program tersebut (Kemnaker, 2022).

Ketiga, evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap implementasi model manpower planning perlu dilakukan untuk memastikan efektivitasnya. SMK harus mengumpulkan data mengenai keterserapan lulusan dan melakukan analisis untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Penelitian oleh Sari dan Rahardjo (2021) menunjukkan bahwa SMK yang melakukan evaluasi rutin terhadap program pendidikan mereka mampu meningkatkan kinerja lulusan di pasar kerja.

Dari pembahasan tersebut, didapat hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan model manpower planning dan keterserapan tenaga kerja lulusan SMK. Dari 100 responden, 65% menyatakan bahwa mereka merasa siap untuk bekerja setelah lulus, namun hanya 40% yang berhasil mendapatkan pekerjaan dalam waktu enam bulan setelah kelulusan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun lulusan merasa siap, masih ada kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki dan yang dibutuhkan oleh industri.

Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya keterserapan tenaga kerja adalah kurangnya kolaborasi antara SMK dan industri. Penelitian oleh Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan bahwa hanya 30% SMK yang memiliki kemitraan aktif dengan industri (Kemendikbud, 2023). Oleh karena itu, penting bagi SMK untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan dunia usaha agar kurikulum yang diajarkan dapat sesuai dengan kebutuhan pasar.

Contoh kasus yang relevan adalah SMK Negeri 1 Bandung yang berhasil meningkatkan keterserapan lulusannya hingga 50% setelah menerapkan model manpower planning yang melibatkan industri dalam proses pembelajaran. Dengan mengundang praktisi industri untuk memberikan pelatihan dan sertifikasi, SMK tersebut mampu menghasilkan lulusan yang lebih siap kerja dan memiliki keterampilan sesuai dengan permintaan pasar.

KESIMPULAN

Model manpower planning sebagai basis perencanaan pembiayaan pendidikan di SMK sangat penting untuk meningkatkan keterserapan tenaga kerja. Dengan memahami kebutuhan industri dan menyesuaikan kurikulum, SMK dapat menghasilkan lulusan yang siap pakai dan sesuai dengan tuntutan pasar. Oleh karena itu, kolaborasi antara SMK, pemerintah, dan industri perlu ditingkatkan untuk menciptakan sinergi yang positif dalam pengembangan pendidikan vokasi.

Rekomendasi selanjutnya adalah perlunya peningkatan alokasi dana untuk pendidikan vokasi agar SMK dapat menyediakan fasilitas dan program pendidikan yang berkualitas. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana juga harus diperhatikan untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan keterserapan tenaga kerja lulusan SMK dapat meningkat, sehingga dapat berkontribusi terhadap pengurangan angka pengangguran di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. (2022). Laporan Penggunaan Internet di Indonesia.
- Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). (2023). Laporan Tahunan 2023. Jakarta: BNSP
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik Ketenagakerjaan
- Hidayat, R., & Yuniarti, S. (2021). Implementasi Model Manpower Planning di SMK. *Jurnal Pendidikan Teknik*, 12(2), 78-89.
- Kementerian Ketenagakerjaan. (2022). Data Keterserapan Lulusan SMK.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). (2023). Kebijakan Pendidikan Vokasi. Jakarta: Kemendikbud.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). Laporan Tahunan Pendidikan Vokasi.
- Nurlaila, I., & Rahman, A. (2020). Pengaruh Program Magang Terhadap Keterserapan Lulusan SMK. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5(1), 45-56.
- Purwanto, A., & Sari, R. (2021). Analisis Keterserapan Lulusan SMK di Pasar Kerja. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 10(2), 123-134
- Setiawan, B., & Prasetyo, A. (2022). Transparansi Pengelolaan Keuangan di SMK. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(3), 201-210.
- World Bank. (2020). Investing in Vocational Education: A Global Perspective.